



Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

Halia Butra Aini¹, Vivi Usmayanti², Rasyida Pertiwi³, Vinny Dwi Melliny⁴

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia^{1,3,4}

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia²

*Email Korespondensi: haliabutraaini@fe.unsri.ac.id

Diterima: 20-07-2025 | Disetujui: 28-07-2025 | Diterbitkan: 30-07-2025

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy aims to enhance fiscal independence and promote regional economic growth. However, the effectiveness of this policy still requires further investigation, particularly in Jambi Province, which has experienced various fiscal dynamics since the introduction of autonomy. This study uses secondary time series data from 1998 to 2017, sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and the Regional Finance Agency of Jambi Province. The analytical methods applied are descriptive and quantitative analyses to assess the impact of regional financial performance—including independence, dependence, and fiscal decentralization—on economic growth before and after regional autonomy. The study finds that regional financial independence has a positive and significant effect on economic growth. In contrast, fiscal dependence and fiscal decentralization show a negative and significant effect. Before the implementation of autonomy, no individual variable had a significant impact, although collectively they influenced economic growth. There are notable differences in local government fiscal performance after regional expansion, especially in terms of fiscal efforts, independence, and dependence on financing. Regional financial performance plays a crucial role in driving economic growth. Strengthening fiscal independence is key to the successful and sustainable implementation of regional autonomy.

Keywords: Regional Autonomy, Fiscal Independence, Fiscal Dependence, Economic Growth, Regional Financial Performance, Fiscal Decentralization, Jambi Province

ABSTRAK

Penerapan otonomi daerah bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya di Provinsi Jambi yang mengalami berbagai dinamika fiskal sejak otonomi diberlakukan. Penelitian ini menggunakan data sekunder deret waktu dari tahun 1998 hingga 2017 yang bersumber dari BPS dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif untuk mengukur pengaruh kinerja keuangan daerah—yang meliputi kemandirian, ketergantungan, dan desentralisasi fiskal—terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum

dan sesudah otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketergantungan fiskal dan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan. Sebelum otonomi, tidak ada variabel yang secara individual signifikan, meskipun secara simultan berpengaruh. Terdapat perbedaan nyata dalam kinerja fiskal pemerintah daerah, terutama dalam aspek upaya fiskal, kemandirian, dan ketergantungan pembiayaan setelah pemekaran wilayah. Kinerja keuangan daerah terbukti berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan kemandirian fiskal menjadi kunci dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah secara berkelanjutan.

Katakunci: Otonomi Daerah, Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Kinerja Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Provinsi Jambi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Butra Aini, H., Rasyida Pertiwi, & Vinny Dwi Melliny. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Vivi Usmayanti, Trans.). Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(3), 1062-1074. <https://doi.org/10.63822/nyb1kk78>

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, dalam UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk penyelenggaraan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberi hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. (Ayuningtyas, 2008).

Meskipun sudah dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat masih memiliki tanggung jawab dalam hal memberikan sejumlah dana kepada daerah yang tujuan utamanya adalah redistribusi, yaitu mengatasi ketimpangan fiskal antar-daerah. Namun banyak daerah-daerah yang masih sangat tergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat dibanding berusaha menggali pendapatan dari sumber pemerintah daerah sendiri sebagaimana amanat desentralisasi itu sendiri. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Bahkan di masa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pun nilai transfer meningkat setiap tahunnya.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Dalam struktur APBD, pengeluaran pemerintah Kota/Kabupaten yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Sebagai daerah yang sedang giat membangun, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian.

Provinsi Jambi adalah salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, tetapi dalam pengelolaan keuangannya masih saja kurang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi dengan total pendapatan yang diperoleh baik dari hasil daerah provinsi jambi maupun bantuan dari pusat mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun, kenaikan total pendapatan diikuti oleh kenaikan total belanja yang dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi berada diatas total pendapatannya dari nilai realisasi setiap tahunnya.

Tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	Total Belanja	(%)	Total Pendapatan	(%)
2012	1.498.751	-0,41	1.399.121	7,22
2013	1.942.503	29,61	1.734.302	23,96
2014	2.652.826	36,57	2.446.374	41,06
2015	3.265.329	23,09	2.981.991	21,89
2016	3.513.161	7,59	3.293.250	10,44
2017	3.742.023	6,51	3.441.962	4,52
Rata - rata		17,16		18,18

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel 1 APBD Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan nilai realisasi total belanja dan total pendapatan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 total belanja melebihi total pendapatan yaitu masing – masing sebesar Rp. 3.742.023.060.000,- (tiga triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar dua puluh tiga juta enam puluh ribu) dan Rp. 3.441.962.710.000 (tiga triliun empat ratus empat puluh satu miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu). Namun rata –rata pertumbuhan total pendapatan berada diatas rata –rata total belanja yaitu masing – masing sebesar 18,18 persen dan 17,16 persen. Besarnya defisit anggaran yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Jambi mengidentifikasikan adanya pembangunan yang terjadi di Provinsi Jambi, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya total belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi baik untuk infrastruktur, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, disini lain defisit anggaran mengidentifikasikan belum optimalnya pemerintah daerah dalam menggunakan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, yang dapat dialokasikan untuk belanja daerah.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peran kinerja keuangan daerah dalam mempengaruhi keputusan pengalokasian anggaran belanja modal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Memang banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses penyusunan anggaran hingga munculnya masalah-masalah keagenan, di antaranya kondisi keuangan daerah, kepentingan pribadi (private interest) dan kepentingan politik. Namun dari sekian banyak faktor, yang mudah diukur (observable) adalah faktor yang berasal dari keuangan daerah itu sendiri, jadi penelitian ini akan mengambil variabel yang berasal dari keuangan daerah, yaitu kinerja keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, penelitian yang penulis lakukan memiliki tujuan sebagai berikut: (a) Menganalisis perkembangan kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi Tahun 1998-2017. (b) Menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Analisis ini dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian kedua, yaitu untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, kemandirian daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dengan menggunakan model ekonometrika untuk mencerminkan hasil dari pembahasan yang

Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

(Butra Aini, et al.)

dinyatakan dengan angka. Model yang digunakan dalam analisis ini adalah model ekonometrika dengan model *Ordinary Least Square (OLS)* dimana data-data yang akan diolah merupakan *Time Series* yang diperoleh dan diteliti dalam beberapa waktu.

Berikut merupakan persamaan analisis regresi berganda:

$$PE = \{DDF, KKD, KTD\} \dots\dots\dots (3.4)$$

Maka di peroleh model persamaan sebagai berikut:

$$PE_t = \beta_1 + \beta_2 DDF_t + \beta_3 KKD_t + \beta_4 KTD_t + \varepsilon \dots\dots\dots (3.5)$$

Di mana:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

KKD = Tingkat Kemandirian Daerah

KTD = Tingkat Ketergantungan Daerah data tersebut dan kode aksesnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan Total Penerimaan Daerah.

Tabel 2 Rasio Desentralisasi Fiskal Provinsi Jambi Tahun 1998-2017

TAHUN	PAD	%	TPD	%	PAD/TPD	DDF
1998	28.857.179.819	-	53.004.768.803	-	54,44	Sangat Baik
1999	41.414.561.579	43,52	94.790.796.641	78,83	43,69	Baik
2000	69.851.417.357	68,66	174.360.850.866	83,94	40,06	Baik
2001	82.232.143.000	17,72	297.734.347.000	70,76	27,62	Sedang
2002	111.000.834.369	34,98	449.304.175.000	50,91	24,71	Sedang
2003	187.639.300.115	69,04	616.193.475.000	37,14	30,45	Cukup
2004	246.236.225.000	31,23	630.144.010.000	2,26	39,08	Cukup
2005	347.837.812.858	41,26	748.820.793.000	18,83	46,45	Baik
2006	385.042.833.000	10,70	819.586.370.000	9,45	46,98	Baik
2007	382.082.234.000	-0,77	1.010.116.940.000	23,25	37,83	Cukup
2008	454.441.987.000	18,94	1.155.350.580.000	14,38	39,33	Cukup
2009	526.442.077.650	15,84	1.436.448.060.000	24,33	36,65	Cukup
2010	686.629.362.314	30,43	1.353.900.460.000	-5,75	50,71	Sangat Baik
2011	984.232.579.912	43,34	1.640.185.860.000	21,15	60,01	Sangat Baik

2012	713.559.311.667	-27,50	1.734.302.270.000	5,74	41,14	Baik
2013	804.414.207.083	12,73	2.446.374.630.000	41,06	32,88	Cukup
2014	973.070.077.063	20,97	2.981.991.350.000	21,89	32,63	Cukup
2015	1.218.125.069.042	25,18	3.293.250.800.000	10,44	36,99	Cukup
2016	1.273.892.966.618	4,58	3.394.795.870.000	3,08	37,52	Cukup
2017	1.393.072.790.798	9,36	4.163.724.816.402	22,65	33,46	Cukup
Rata - rata		24,75		28,12	39,63	Cukup

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa sejak tahun 1998-2017 persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD) mengalami fluktuasi. Besaran kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah dari tahun 1998-2017 yang mengalami fluktuasi selama periode tersebut yang menggambarkan derajat desentralisasi fiskal yang tidak stabil. Tahun 2004, kontribusi PAD terhadap TPD sebesar 39,08 persen. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan dari masing-masing kontribusi TPD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan subsidi pusat. Tahun 2006 kontribusi PAD terhadap TPD cukup baik sebesar 46,98 persen, namun persentase kenaikan TPD hanya 9 persen saja. Persentase kenaikan TPD terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak stabil pada tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan PAD dan dana perimbangan. Namun pada tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 39,33 persen yang dikarenakan terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata Total Penerimaan Daerah selama tahun 1998-2017 sebesar 28,12 persen. Sedangkan rata-rata kontribusi PAD terhadap TPD sebesar 39,63 persen. Dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah provinsi Jambi dilihat dari perbandingan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah dikategorikan cukup baik, namun belum optimal. Perlu dilakukan peningkatan kinerja melalui langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan PAD dengan menggali potensi yang ada baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah.

Rasio Ketergantungan keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan transfer yang diterima Pemerintah Daerah dengan Total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin. Hal ini bertujuan agar PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Elmi, 2002). Pada Pemerintah provinsi jambi, rasio ketergantungan keuangan daerah dari tahun 1998 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Perkembangan Rasio ketergantungan Keuangan Daerah
Provinsi Jambi Tahun 1998-2017

TAHUN	DTE	TPD	DTE/TPD	KKD
1998	40.920.766.173	53.004.768.803	77,20	Sangat Tinggi
1999	76.085.342.716	94.790.796.641	80,27	Sangat Tinggi

Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

(Butra Aini, et al.)

2000	104.398.370.871	174.360.850.866	59,87	Sangat Tinggi
2001	131.738.152.072	297.734.347.000	44,25	Tinggi
2002	237.453.112.000	449.304.175.000	52,85	Sangat Tinggi
2003	266.403.018.000	616.193.475.000	43,23	Tinggi
2004	279.894.258.000	630.144.010.000	44,42	Tinggi
2005	393.688.551.000	748.820.793.000	52,57	Sangat Tinggi
2006	532.035.039.025	819.586.370.000	64,92	Sangat Tinggi
2007	704.299.703.877	1.010.116.940.000	69,72	Sangat Tinggi
2008	805.271.241.378	1.155.350.580.000	69,70	Sangat Tinggi
2009	826.020.480.233	1.436.448.060.000	57,50	Sangat Tinggi
2010	953.131.620.365	1.353.900.460.000	70,40	Sangat Tinggi
2011	1.093.207.719.995	1.640.185.860.000	66,65	Sangat Tinggi
2012	1.665.586.782.809	1.734.302.270.000	96,04	Sangat Tinggi
2013	1.854.055.309.316	2.446.374.630.000	75,79	Sangat Tinggi
2014	1.882.125.324.008	2.981.991.350.000	63,12	Sangat Tinggi
2015	1.899.918.484.381	3.293.250.800.000	57,69	Sangat Tinggi
2016	2.045.036.815.556	3.394.795.870.000	60,24	Sangat Tinggi
2017	2.766.192.134.604	4.163.724.816.402	66,44	Sangat Tinggi
Rata - rata			63,64	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

Tingkat ketergantungan keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan rasio antara PAD dengan Pendapatan transfer tanpa subsidi pada Pemerintah Provinsi Jambi yang berfluktuatif, namun kecenderungan tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2002 tingkat ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Pemerintah Pusat sebesar 59.87 persen dan pada tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 44.25 persen.

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah pada Provinsi Jambi pada tahun 2008 dengan besarnya persentase 69.70%, pada tahun 2009 Rasio Ketergantungan Daerah mengalami penurunan dengan besarnya persentase 57.50%, pada tahun 2010 Rasio Ketergantungan Daerah mengalami peningkatan lagi dikarenakan tingginya Dana Alokasi Khusus dengan besarnya persentase 70.40%, hingga tahun 2012 dengan tingkat ketergantungan daerah sebesar 96.04 persen, dengan kategori sangat tinggi.

Pada tahun 2015 Rasio Ketergantungan Daerah mengalami penurunan lagi dikarenakan rendahnya Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dengan besarnya persentase 57.69 persen dikategorikan ketergantungannya tinggi. Rata-rata persentase Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Jambi selama tahun 1998-2017 sebesar 63.64 persen dikategorikan ketergantungannya tinggi, keadaan ini menunjukkan tingkat ketergantungan Provinsi Jambi masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Secara umum perubahan persentase tetap masih berada pada kriteria yang sama. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat selama periode analisis adalah 63.64 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya belum begitu optimal dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah, sehingga pemerintah Provinsi Jambi masih sangat bergantung dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Tabel 4
Perkembangan Rasio kemandirian Keuangan Daerah
Provinsi Jambi Tahun 1998-2017

TAHUN	PAD	DTF	PAD/DTF	KKD
1998	28,857,179,819	40,920,766,173	70.52	Sedang
1999	41,414,561,579	76,085,342,716	54.43	Sedang
2000	69,851,417,357	104,398,370,871	66.91	Sedang
2001	82,232,143,000	131,738,152,072	62.42	Sedang
2002	111,000,834,369	237,453,112,000	46.75	Rendah
2003	187,639,300,115	266,403,018,000	70.43	Sedang
2004	246,236,225,000	279,894,258,000	87.97	Tinggi
2005	347,837,812,858	393,688,551,000	88.35	Tinggi
2006	385,042,833,000	532,035,039,025	72.37	Sedang
2007	382,082,234,000	704,299,703,877	54.25	Sedang
2008	454,441,987,000	805,271,241,378	56.43	Sedang
2009	526,442,077,650	826,020,480,233	63.73	Sedang
2010	686,629,362,314	953,131,620,365	72.04	Sedang
2011	984,232,579,912	1,093,207,719,995	90.03	Tinggi
2012	713,559,311,667	1,665,586,782,809	42.84	Rendah
2013	804,414,207,083	1,854,055,309,316	43.39	Rendah
2014	973,070,077,063	1,882,125,324,008	51.70	Sedang
2015	1,218,125,069,042	1,899,918,484,381	64.11	Sedang
2016	1,273,892,966,618	2,045,036,815,556	62.29	Sedang
2017	1,393,072,790,798	2,766,192,134,604	50.36	Sedang
Rata - rata			63.57	Sedang

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan diketahui bahwa pada periode tahun anggaran 1998 - 2017 menunjukkan persentase yang berfluktuatif tiap tahunnya. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Jambi pada tahun 2012 Rasio Kemandirian Daerah dengan besarnya persentase 42,84 persen dikategorikan kemampuannya rendah, pada tahun 2013 Rasio Kemandirian Daerah kembali mengalami penurunan diakibatkan dana Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer memiliki persentase sebesar 43,39

persen yang dikategorikan kemampuannya rendah, tetapi pada tahun 2014 Rasio Kemandirian Daerah meningkat lagi dengan besarnya persentase 64.11 persen karena dana transfer pusat naik dari tahun sebelumnya. Rata-rata persentase Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Jambi selama tahun 1998-2017 sebesar 63,57 persen dan dalam kategori kemampuan sedang. Penerapan kebijakan otonomi daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatan daerah. Faktanya, bahwa kemandirian daerah akan sangat bergantung dari besarnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada pemerintah provinsi Jambi selama periode tahun anggaran 1998-2017, rata-rata tingkat kemandirian sebesar 63,57 persen. Hal ini diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah adalah provinsi dengan tingkat kemandirian keuangan daerah sedang. Menunjukkan bahwa provinsi Jambi selama periode tahun 1998-2017 memiliki kemandirian keuangan yang sedang memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bantuan dana transfer dari pusat dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Daerah, Kemandirian Daerah dan Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi.

Dengan menggunakan regresi persamaan linier untuk persamaan 1 mengstimasi hasil perhitungan regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Secara spesifik dinyatakan dengan model persamaan berikut :

$$PE = C(1) + C(2)*KKD + C(3)*KTD + C(4)*DDF + C(5)*D \dots\dots\dots (4.1)$$

Untuk mengestimasi persamaan, dalam penelitian ini digunakan model ekonometrika *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil estimasi model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Estimasi Model OLS

Dependent Variable: PE				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.678627	0.750560	2.236499	0.0078
KTD	-0.356150	0.170310	-2.091186	0.0372
KKD	0.575082	0.160681	3.579029	0.0254
DDF	-0.674861	0.268487	-2.513570	0.0049
D	4.615671	1.502442	3.072113	0.0077
R-squared	0.826526	Mean dependent var		5.494000
Adjusted R-squared	0.773599	S.D. dependent var		2.577789
F-statistic	27.89088	Durbin-Watson stat		1.533631
Prob(F-statistic)	0.006486			

Sumber: Hasil olahan Eviews 8.0

Dari hasil persamaan diatas, terlihat bahwa ketergantungan daerah memiliki hubungan yang signifikan, namun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Dari hasil uji t yang dilakukan, nilai yang dihasilkan untuk variabel ketergantungan daerah sebesar 2.091186 (merujuk pada tabel hasil uji t). Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.70562. Dengan nilai t hitung > t tabel, maka variabel ketergantungan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut diperkuat dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.0372 kecil dari nilai probabilitas $\alpha=0,05$. Sehingga,

ketergantungan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil pengujian juga didapatkan nilai koefisien regresi ketergantungan daerah sebesar 0.356150 (merujuk pada Tabel 5.4), yang berarti bahwa setiap kenaikan ketergantungan daerah Provinsi Jambi sebesar 1 persen, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi sebesar 0.356150 persen. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa ketergantungan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Dari hasil uji t yang dilakukan, nilai yang dihasilkan untuk variabel kemandirian daerah sebesar 3.579029 (merujuk pada tabel hasil uji t). Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.70562. Dengan nilai t hitung > t tabel, maka variabel kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut diperkuat dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.0254 kecil dari nilai probabilitas $\alpha=0,05$. Sehingga, kemandirian daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil pengujian juga didapatkan nilai koefisien regresi kemandirian daerah sebesar 0.575082 (merujuk pada Tabel 5.4), yang berarti bahwa setiap kenaikan kemandirian daerah Provinsi Jambi sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi sebesar 0.575082 persen. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa kemandirian daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan, namun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap peningkatan 1 persen derajat desentralisasi fiskal akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.674861 persen. Dari hasil uji t yang dilakukan, nilai yang dihasilkan untuk variabel desentralisasi fiskal sebesar 2.513570 (merujuk pada tabel hasil uji t). Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.70562. Dengan nilai t hitung > t tabel, maka variabel desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut diperkuat dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.0049 kecil dari nilai probabilitas $\alpha=0,05$. Sehingga, desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Apabila rasio desentralisasi fiskal meningkat akan menurunkan pembiayaan belanja modal untuk publik dari sumber penerimaan yang lain hal ini berarti bahwa kemampuan pemerintah daerah di Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan masih sangat kurang, yang menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan restitusi daerah.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian sebaliknya. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana semakin tinggi kemandirian keuangan daerah menggambarkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan restitusi daerah. Pajak dan restitusi daerah merupakan komponen dari PAD. Kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dari perbandingan PAD dengan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Hasil estimasi menunjukkan pengaruh yang positif secara signifikan dari kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah akan berimplikasi pada kenaikan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dapat membuktikan hipotesis pertama bahwa kemandirian fiskal daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Greydi Normala Sari, Paulus Kindangen dan Tri Oldy Rotinsulu (2015) yang menyatakan kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi desentralisasi fiskal adalah kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Semakin mandiri suatu daerah akan semakin leluasa dalam melakukan pembangunan ekonomi.

Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan akan tetapi. DAU pada kenyataannya merupakan sumber pendanaan terbesar dan utama bagi pemerintah daerah yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat kepada daerah. Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila rasio desentralisasi fiskal meningkat akan menurunkan pembiayaan belanja modal untuk publik dari sumber penerimaan yang lain hal ini berarti bahwa kemampuan pemerintah daerah di Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan masih sangat kurang, yang menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan restitusi daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Novita, Zulkifli Boki dan Siti Pratiwi Husain (2015) yang menyatakan desentralisasi fiskal berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi tentang pajak daerah yang telah ditetapkan serta upaya untuk menggali potensi pajak daerah. Secara konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan besarnya beban kewenangan tersebut. Konsep ini dikenal dengan *money follow function*, bukan lagi *function follow money*. Artinya, pemerintah pusat berkewajiban menjamin sumber keuangan terkait dengan pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal, yang menjelaskan adanya hubungan negatif dan signifikan antara ketergantungan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang. Namun demikian kebijakan- kebijakan desentralisasi fiskal yang ada tidak sertamerta dapat membangun kemandirian daerah dengan cepat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Penelitian Greydi Normala Sari, Paulus Kindangen dan Tri Oldy Rotinsulu (2015) yang menyatakan ketergantungan daerah berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi karena belum optimalnya penerimaan dari PAD dan belum optimalnya pendapatan/laba BUMD. Kecilnya PAD yang digunakan dalam membiayai belanja modal untuk pelayanan publik dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer untuk membiayai

pembangunan. Sampai saat ini potensi pendapatan asli daerah masih menitikberatkan pada perolehan pajak dan retibusi daerah. Butuh waktu yang lama untuk membangun kemandirian daerah dalam membiayai anggaran pengeluaran belanja daerah minimal belanja pegawainya.

Dari pengujian hipotesis di atas juga terlihat bahwa dummy kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tuntutan agar pembangunan tidak hanya berjalan di daerah-daerah yang dekat dengan pemerintahan pusat saja, telah membuat pemerintah mengupayakan strategi yang dapat mewujudkan terciptanya pembangunan. Hal tersebut mendorong lahirnya otonomi daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Provinsi Jambi yang merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang ikut serta mengimplementasikan kebijakan otonomi tersebut. Otonomi daerah dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, Provinsi Jambi diberi kewenangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya secara leluasa untuk dialokasikan pada sektor-sektor ekonomi yang ada. Oleh karena itu, perlu diterapkan sektor-sektor yang harus diprioritaskan dalam membangun perekonomian Provinsi Jambi.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan pertama penelitian, yaitu untuk menganalisis perkembangan kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi Tahun 1998-2017. Sejak tahun 1998-2017 persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD) mengalami fluktuasi. Besaran kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah dari tahun 1998-2017 yang mengalami fluktuasi selama periode tersebut yang menggambarkan derajat desentralisasi fiskal yang tidak stabil. Tingkat ketergantungan keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan rasio antara PAD dengan Pendapatan transfer tanpa subsidi pada Pemerintah Provinsi Jambi yang berfluktuatif, namun kecendrungan tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Secara umum perubahan persentase tetap masih berada pada kriteria yang sama. Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan diketahui bahwa pada periode tahun anggaran 1998 - 2017 menunjukkan persentase yang berfluktuatif tiap tahunnya. Hal ini diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah adalah provinsi dengan tingkat kemandirian keuangan daerah sedang. Sehingga menunjukkan bahwa provinsi Jambi selama periode tahun 1998-2017 memiliki kemandirian keuangan yang sedang sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bantuan dana transfer dari pusat dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Hasil penelitian yang selama periode sebelum penerapan kebijakan otonomi daerah dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Selama periode sebelum penerapan otonomi daerah, secara individu tidak terdapat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di daerah penelitian. Hal tersebut terlihat dari masing-masing variabel yang tidak signifikan dalam taraf signifikansi 5 persen. Kemudian, terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah, serta terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek kemandirian dan ketergantungan pembiayaan sesudah pemekaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukriy. 2006. “Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan studi pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera”. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2 No 2.Nov. 2006.
- Adam, H., & Seftianova, R. (2013). Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah KPPN Malang. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 4(1), 75–84
- Ahmad Yani. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Annafi Indra Tama. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten/Kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. JRAK. Vol.6 No.2 Agusuts 2015 Hal. 20- 32 20 Fakultas Ekonomi UNISMA Bekasi
- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta.
- Berliani, Kartika. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka. E-Jurnal STIE INABA 15 (2).
- Boediono. 2012. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi Pertama. Yogyakarta; BPFE
- Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Djojohadikusumo, Sumitro 1994. Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta : LP3ES
- Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer. 1996. Macroeconomics (New York: McGraw- Hill Book Company, 6th ed. IMF Papers on Policy Analysis and Assessment 96/6 (Washington: International Monetary Fund)
- Gregorius Gehi Batafor. 2011. Evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat kabupataen Lembata Provinsi NTT. Jurnal SOROT Vol 9 No 1 April hal 1 – 121. Lembaga Penelitian Universitas Riau.
- Gunantara, Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.3. Bali.
- Greydi Normala Sari, Paulus Kindangen, Tri Oldy Rotinsulu. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol 18, No 2.
- Nurulafifah., Tyas 2012. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010. Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia (KPAI). Vol 1 No 1.
- Khusaini, Mohammad. 2006. Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Malang; Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.Malang : BPFE Universitas Brawijaya